BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka mengembangkan masyarakat otonomi daerah menuju kemandirian menetapkan arah kebijakan strategis yang disebut "tetra batu tungku" yaitu : Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pengembangan Infra Struktur, Penguatan Ekonomi Masyarakat dan Penguatan Pemerintahan sesuai misi yang telah ditetapkan.

Dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan daerah, maka perlu dilaksanakan pembangunan di sektor Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan berbagai macam kegiatan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat didayagunakan secara optimal, efisien dan efektif.

Agar pembangunan terarah dan berkesinambungan maka perlu adanya perencanaan strategi yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan program kerja.

Rencana strategis Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah dokumen teknis operasional yang merupakan pedoman dan penyusunan program kerja tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan dan belanja sektor Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, 2011 – 2015.

Sedangkan fungsinya adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan kerja.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunannya, Rencana Kerja Strategis (Renstra) Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2010 memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan antara lain :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi dan Misi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu;
20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
21. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penetapan rencana strategis dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan sektor Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama 5 (lima) tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan rencana strategis untuk dapat digunakan sebagai instrument dalam mengukur efesiensi dan efektifitas kinerja dan sebagai dasar penyusunan rencana kerja.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Berisikan uraian tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Memuat dan mengungkapkan Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan VISI, MISI dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dan Penentuan Isu-isu strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

Berisikan uraian tentang Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD serta Strategi dan kebijakan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

- **Tugas Pokok**

  Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- **Fungsi**
  - Pengelolaan kesekretariatan;
  - Pembinaan dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - Pembinaan keluarga sejahtera
  - Pembinaan keluarga berencana.

- **Uraian Tugas**
  - Menyusun program bidang keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis bidang keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - Melaksanakan kegiatan keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - Membina dan mengkoordinasikan unit pelaksana teknis badan.
  - Mengendalikan pengelolaan kegiatan ketatausahaan.
  - Mengevaluasi pelaksanaan tugas;
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

2.2 SUMBER DAYA SKPD

Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki sumber daya manusia yang cukup besar, tercatat secara keseluruhan berjumlah 107 orang (Pegawai kantor & dilapangan).

Sementara para pegawai yang ada pada Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menduduki Jabatan Struktural, sebagaimana dimaksud pada Susunan Organisasi di atas, secara rinci dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 1 : Pejabat Stuktural pada Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Jabatan	Esselon
1.	Kepala Badan	II.b
2.	Sekretaris	III.a
3.	Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	III.b
4.	Kabid Bina Peran Serta Masyarakat dan Keluarga Sejahtera	III.b
5.	Kabid Keluarga Berencana	III.b
6.	Kasubbid Keluarga Berencana	IV.a
7.	Kasubbid Kesehatan Reproduksi	IV.a
8.	Kasubbid Pemberdayaan Perempuan	IV.a
9.	Kasubbid Perlindungan Anak	IV.a
10.	Kasubbid Pember. Ketahanan Keluarga	IV.a
11.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	IV.a
12.	Kasubbag Dokumentasi dan Pelaporan	IV.a

Staf-Staf pada Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tugasnya membantu para Kepala sub Bidang dan Kepala Subbag yang jumlahnya bervariasi yaitu …. orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2 : Jumlah Staf / Karyawan pada Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Bidang/ Bagian	Sub Bagian / Sub Bidang	Jumlah
1	Sekretariat	a. Subbag Umum dan Kepegawaian	1
		b. Subbag Perencanaan dan Keuangan	5
		c. Subbag Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan	1
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan;	1
		b. Sub Bidang Perlindungan Anak.	1
3	Bidang Keluarga Berencana	a. Sub Bidang Gerakan Keluarga Berencana	2
		b. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi	3
4	Bidang Keluarga Sejahtera	a. Sub Bidang Pember. Ketahanan Keluarga	2
		b. Sub Bidang Peran Serta Masyarakat	2

Untuk efektifnya pelaksanaan tugas Program Nasional Keluarga Berencana perlu adanya Petugas yang handal di lapangan guna melakukan penyuluhan KB pada Masyarakat, dengan nama Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Oleh karena itu maka dibentuklah UPT di Kecamatan yang di Kepalai seorang Koordinator PLKB yang bertugas mengkoordinir PLKB yang berada di wilayah kerjanya dan sekaligus memberikan laporan kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Kelurga Berencana.

Untuk mengetahui lebih jauh keadaan jumlah Pegawai Petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana pada masing-masing Kecamatan, berikut kami sampaikan data seperti di bawah ini :

TABEL 3 : Jumlah Petugas PLKB

No	Kecamatan	PLKB/PLK	PLKB	Jumlah
		PNS	PTT	
1	Batulicin	3	1	4
2	Simpang Empat	2	8	10
3	Mentewe	1	4	5
4	Karang Bintang	1	8	9
5	Kusan Hulu	1	16	17
6	Kusan Hilir	8	17	25
7	Sungai Loban	5	4	9
8	Angsana	-	5	5
9	Satui	4	5	9
10	Kuranji	-	5	5
	Jumlah	**25**	**73**	**98**

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah PLKB tercatat 98 orang yang terdiri dari PNS 24 orang 69 orang PTT

2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan pada Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu, berikut uraian masing-masing bidang di bawah ini :

A. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam upaya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan desa telah difokuskan pada program pemberdayaan perempuan melalui kegiatan-kegiatan perumusan kebijakan dan fasilitasi aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian dalam pembangunan menuju otonomi desa, program tersebut antara lain :

1. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan melalui kegiatan pembinaan organisasi perempuan.
2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan melalui Sosialisasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di atas telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir. Kegiatannya dilaksanakan

dengan melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan sampai kepada pelaksanaan, sehingga banyak hasil yang telah dicapai antara lain :

1. Telah dilatih sebanyak 60 orang (organisasi perempuan) tentang Kebijakan Gender
2. Melaksanakan penyuluhan UU nomor 23 tentang Perlindungan Anak dan tindak kekerasan terhadap perempuan
3. Dilaksanakannya Penyuluhan bagi ibu rumah tangga
4. Mengikuti Lomba Tenaga Kerja Wanita (nakerwan), Tanah Bumbu dapat Juara II Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan
5. Mengikuti Lomba P2WKSS dan GSI, dan Tanah Bumbu mendapat Juara Harapan I Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011

B. Bidang Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS)

Program Keluarga Berencana mempunyai arti yang sangat penting dalam upaya mewujudkan Manusia Indonesia Sejahtera, karena kondisi kependudukan di Indonesia pada saat ini, baik yang menyangkut jumlah, kualitas maupun persebarannya merupakan tatangan yang berat yang harus diatasi bagi tercapainya keberhasilan pembangunan Indonesia.

Oleh sebab itu salah satu upaya yang telah dan perlu terus dilakukan pemerintah, bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat adalah dengan pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitasnya.

Bidang KB dan KS sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan kegiatan :

1. Pelayanan Peserta KB baru menurut kontrasepsi MKJP dan Non MKJP di 10 (sepuluh) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, dan Petugas telah berhasil memberikan motivasi dan pelayanan, sesuai data dibawah ini :
   - Inplan (susuk KB) melalui jalur pemerintah sebanyak 84 orang, keluarga pra sejahtera, KS I sebanyak 44 orang.
   - Kondom jalur pemerintah 10 orang, keluarga pra sejahtera, KS I sebanyak 3 orang.
   - Suntikan jalur pemerintah 159 orang , Dokter Praktek swasta 60 orang, bidan praktek swasta 49 orang , keluarga pra sejahtera, KS I sebanyak 44 orang.
   - Pil jalur Pemerintah 156 orang, Dokter praktek swasta 44 orang, bidan praktek swasta 62 orang, keluarga pra sejahtera, KS I sebanyak 77 orang.
   - Jumlah keseluruhan jalur Pemerintah 408 orang, Dokter praktek swasta 104 orang, bidan praktek swasta 111 orang, keluarga pra sejahtera, KS I sebanyak 168 orang.
2. Kegiatan Pembinaan terhadap Masyarakat, telah berhasil membentuk kader-kader dan kelompok-kelompok masyarakat di 135 Desa pada 10 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu :
   - Jumlah PPKBD : 131
   - Jumlah Sub PPKBD : 291
   - Kelompok KB : 98 Kelompok
   - Kelompok Kegiatan BKB : 65 Kelompok
   - Kelompok Kegiatan BKR : 40 Kelompok
   - Kelompok Kegiatan BKL : 38 Kelompok
   - Kelompok Kegiatan BLK : 25 Kelompok
   - Kelompok Kegiatan UPPKS : 23 Kelompok
3. Pada tahun 2011 telah melakukan kegiatan PENDATAAN KELUARGA, dengan hasil sebagai berikut :
   - Jumlah PUS atau REK/I/KS/2008 : 52.290, K Pras dan KS I: 24.097
   - Jumlah peserta KB Aktif : 38.583, K Pras dan KS I : 17.308

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

- **Tantangan**
  - Masih rendahnya pengetahuan masyarakat memanfaatkan SDA yang tersedia
  - Beraneka ragam etnis yang ada di kabupaten Tanah Bumbu.
  - Menurunnya penghargaan terhadap nilai nilai budaya daerah dan nasional yang bercirikan kebangsaan
  - Meningkatnya tuntutan masyarakat pelayanan KB yang bermutu
  - Imbas dari pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis sehingga masyarakat juga menuntut KB gratis
  - Masih rendahnya keterlibatan lintas sektor dalam Pengarus Utamaan Gender (PUG)
  - Belum optimalnya institusi-institusi masyarakat dalam melaksanakan program KB
- **Peluang**
  - Tingginya animo masyarakat ikut ber KB
  - Mudahnya masyarakat memperoleh informasi tentang KB
  - Adanya dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) di bidang KB setiap tahun dari pusat
  - Adanya payung hukum kesetaraan dan keadilan gender
  - Adanya kewenangan Pemerintah Daerah di bidang KB dan PP sesuai PP Nomor 38 tahun 2007
- **Kekuatan**
  - Personil yang mencukupi
  - Sumber daya alam cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal
  - Etos kerja yang tinggi
  - Motivasi perempuan dalam KB dan PP tinggi
- **Kelemahan**
  - Kualitas keterampilan yang rendah
  - Belum optimalnya anggaran
  - Kurangnya fasilitas kerja.

Tabel Analisis Strategi dengan Faktor SWOT

INTERNAL / EKSTERNAL	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	- Personil yang mencukupi - Sumber daya alam cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal - Etos kerja yang tinggi - Motivasi perempuan dalam KB dan PP tinggi	- Kualitas keterampilan yang rendah - Belum optimalnya anggaran - Kurangnya Fasilitas Kerja
PELUANG (O)	**STRATEGI S + O**	**STRATEGI W + O**
-Tingginya animo masyarakat ikut ber KB - Mudahnya masyarakat memperoleh informasi tentang KB - Adanya dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) di bidang KB setiap tahun dari pusat - Adanya payung hukum kesetaraan dan keadilan gender - Adanya kewenangan Pemerintah Daerah di bidang KB dan PP sesuai PP Nomor 38 tahun 2007	- Optimalkan Pesonil yang mencukupi dan semangat kerja untuk dapat memamfaatkan SDA dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan bidangnya Optimalkan Etos kerja yang tinggi - Tingkatkan motivasi perempuan dalam KB dan PUG	- Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah dan pekerja serta peran serta masyarakat dalam pembangunan - Usulkan Anggaran Sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatnya fasilitas kerja.
TANTANGAN (T)	**STRATEGI S + T**	**STRATEGI W + T**
- Masih rendahnya pengetahuan masyarakat memanfaatkan SDA yang tersedia - Beraneka ragam etnis yang ada di kabupaten Tanah Bumbu. - Menurunnya penghargaan terhadap nilai nilai budaya daerah dan nasional yang bercirikan kebangsaan -Meningkatnya tuntutan masyarakat pelayanan KB yang bermutu - Imbas dari pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis sehingga masyarakat juga menuntut KB gratis - Masih rendahnya keterlibatan lintas sektor dalam Pengarus Utamaan Gender (PUG) - Belum optimalnya institusi-institusi masyarakat dalam melaksanakan program KB	- Manfaatkan Tenaga yang terampil dalam pemanfaatan SDA yang tersedia dengan Etos kerja yang tinggi - Manfaatkan Tenaga yang terampil dalam Pembinaan Beraneka ragam etnis yang ada di kabupaten Tanah Bumbu, dengan Etos kerja yang tinggi - Optimalkan tenaga yang terampil dalam terhadap nilai nilai budaya daerah dan nasional yang bercirikan kebangsaan, dengan Etos kerja yang tinggi	- Tingkatkan keterampilan kerja dan anggaran serta fasilitas yang cukup untuk memanfaatkan SDA yang tersedia. Dan Pembinaan Beraneka ragam etnis yang ada di kabupaten Tanah Bumbu serta dapat menciptakan kesadaran Menurunnya penghargaan terhadap nilai nilai budaya daerah dan nasional yang bercirikan kebangsaan.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Permasalahan

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

a. Permasalahan Manajemen
   1) Kurangnya koordinasi dinas terkait dalam hal pelaksanaan kegiatan lintas sektoral sehingga sasaran program kerja yang telah dibuat kurang maksimal
   2) Kurangnya fasilitas kerja sehingga pekerjaan yang penting sering tidak bisa mengerjakan dengan segera bahkan terlambat, otomatis menghambat semua kegiatan
b. Permasalahan capaian manfaat dan dampak
   1) Perlunya mengubah persepsi masyarakat tentang kemiskinan melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan dan pembinaan secara teratur sehingga masyarakat sadar akan potensi yang ada. Oleh karena itu bidang KB/KS bidang Pemberdayaan Perempuan agar lebih gender lagi untuk membuat perencanaan program kegiatan
   2) Perlu meningkatkan kemandirian masyarakat melalui program-program pemberdayaan masyarakat dan desa
   3) Perlu lebih ditingkatkan lagi adanya pendidikan politik kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan koordinasi forum diskusi politik

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.

Visi

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta potensi, kondisi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu, maka Visi Kabupaten Tanah Bumbu yang hendak dicapai pada tahun 2011-2015 adalah :

"Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai pusat pelabuhan, perdagangan dan pariwisata terdepan di Kalimantan berbasis ekonomi kerakyatan menuju Tanah Bumbu yang Maju, Unggul, Mandiri, Sejahtera, Aman, Religius dan Berakhlak Mulia serta Berintelektual Tinggi".

Penjabaran makna dari visi Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:

Maju mengandung makna:

semua lapisan masyarakat maju dan berkembang dengan kemampuan dan fondasi ekonomi, sosial dan budaya lokal yang kokoh serta mandiri dengan jati diri yang kuat untuk dapat bertahan dari segala terpaan krisis yang melanda baik bersifat lokal, daerah dan nasional maupun global.

Unggul mengandung makna :

kokohnya ketahanan pilar-pilar pembangunan dan daya saing daerah yang tinggi, baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan politik, maupun kualitas sumber daya manusia; agar tercipta sumber daya manusia yang kreatif dan mampu berinovasi dalam meningkatkan produktivitas yang kompetitif dalam persaingan global.

Mandiri mengandung makna :

daerah yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif yang bersumber dari sumber daya alam dan sumber daya manusia akan dapat mendorong tumbuhnya daya saing daerah, sehingga daerah akan mampu mewujudkan kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunannya.

Sejahtera mengandung makna :
masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata, adil dan berkesinambungan menuju masyarakat yang maju dalam aspek pendidikan dan ilmu pengetahuan, kehidupan ekonomi , kemandirian bekerja dan berusaha untuk mencapai kehidupan yang sejahtera baik lahir maupun bathin (material dan spiritual).
Aman mengandung makna :
terciptanya kondisi keamanan yang kondusif, tidak terlepas dari tatanan masyarakat yang terbentuk baik secara individual dan kolektif maupun secara kelembagaan yang menyadari kewajiban dan haknya sebagai warga masyarakat dan secara sadar mematuhi peraturan dan norma yang berlaku sesuai dengan posisi dan peran sosial nya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Religius mengandung makna :
suasana kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma dan nilai-nilai agama, merupakan tatanan sosial dan budaya yang religius yang dapat dijadikan sebagai modal dasar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan.
Berakhlak mulia mengandung makna :
pembangunan daerah yang dilaksanakan pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya yang didasarkan pada iman dan takwa sebagai perwujudan masyarakat yang berakhlak mulia.
Berintelektual tinggi mengandung makna :
pembangunan daerah yang dilaksanakan pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dilandasi iman dan taqwa kepada Tuhan YME.

Misi

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan penataan ruang wilayah yang mendorong pembangunan berkelanjutan dengan peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas.
2. Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan melalui peningkatan jaringan jasa distribusi lokal, regional dan nasional.
3. Mengembangkan Wisata Unggulan yang selaras dengan Pembangunan Kehidupan Beragama, Sosial dan Budaya.
4. Pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan.
5. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau.
6. Menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih.

Tugas dan fungsi Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan Visi, Misi serta program yang disebut diatas :

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau.

- Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender.
- Meningkatkan kapasitas SDM Tenaga Pengelola Program dan tenaga pelayanan peserta KB.
- Meningkatkan kesertaan ber KB bagi masyarakat dan pembinaan kelompok-kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS.
- Meningkatkan kualitas hidup keluarga.

3.3 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

ISU-ISU STRATEGIS

1. Masih rendahnya pengetahuan tentang perlindungan anak.
2. Pertumbuhan penduduk meningkat.
3. Pengembangan dan pemberdayaan institusi masyarakat dalam program KB belum optimal.
4. Sistim Perencanaan dan Penganggaran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum optimal.
5. Masih kurangnya dukungan lintas sektor dalam KB dan Pengarus Utamaan Gender.
6. Rendahnya partisipsi pria dalam program KB.
7. Imbas dari pelayanan kesehatan gratis, pendidikan gratis sehingga masyarakat juga menuntut KB gratis.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI SKPD

- **VISI**

Visi Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 – 2015 adalah

" TERWUJUDNYA KELUARGA BERKUALITAS, KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK "

Untuk mengwujudkan visi tersebut, Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai misi yang merupakan serangkaian tindakan nyata yang harus diemban dan dilaksanakan.

- **MISI**

Misi Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan keluarga bahagia sejahtera
2. Memperkuat pengarustamaan gender untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan
3. Melindungi anak dari tindak kekerasan

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

Tujuan

Berdasarkan misi Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu, maka ditetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mewujudkan keluarga berkualitas
2. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan
3. Meningkatkan perlindungan terhadap hak anak

Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatanan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif dan dapat diukur.

Sasaran Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu adalah suatu dasar didalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu agar seluruh organisasi sadar akan sesuatu yang akan dicapai, dan untuk itulah Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu telah merumuskan sasaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

- Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh budaya, tokoh wanita.
- Para Praktisi
- Para pelajar SLTP, SLTA, Mahasiswa
- Masyarakat umum
- Kecamatan, Desa / Kelurahan.
- PUS yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu.

- Remaja 10 – 24 Th
- Mahasiswa yang belum menikah
- Pembangunan keluarga berencana diarahkan untuk mengendalikan penduduk serta meningkatkan keluarga kecil berkualitas

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

STRATEGI

Pencapaian tujuan dan sasaran dilengkapi dengan penetapan strategi untuk pencapaianya. Strategi harus dibangun dan dilandasi kepada informasi maupun data-data yang diperoleh dari hasil analisis lingkungan, nilai-nilai yang ada dan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Cara mencapai tujuan dan sasaran ini merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan dan program oprasional dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

- *Menggerakkan dan memberdayakan seluruh potensi masyarakat dalam program KB dan Pemberdayaan Perempuan.*
- *Peningkatan SDM tenaga program KB dan PP baik kualitas maupun kuantitas utamanya di tingkat Kecamatan (PKB/PLKB).*
- *Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan KB dan Pemberdayaan Perempuan.*
- *Meningkatnya pembiayaan program KB dan Pemberdayaan Perempuan.*
- *Koordinasi lintas sektor yang terkait dalam pelaksanaan program KB dan PP.*

KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindak-tindakan tertentu. Elemen-elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi ke dalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan.

Serangkaian kebijakan ditetapkan dalam rangka memberikan batasan dan petunjuk bagi seluruh jajaran staf Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu untuk melangkah.

Kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

- Pemantapan Nilai-nilai budaya dan penguatan lembaga lembaga adat, pemantapan ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dalam pembangunan daerah,
- Meningkatkan kesejahteraan dan kwalitas hidup keluarga dengan program Keluarga Berencana
- Memberdayakan dan memfungsikan fasilitas yang tersedia.
- Mendorong tercapainya berbagai program secara Frofisial.
- Pelayanan gratis bagi keluarga Pra KS & KS I
- Pendewasaan usia kawin, pendidikan kehidupan berkeluarga, keterampilan hidup dalam mempraktekan kehidupan sehat & berakhla sehat.
- Pelayanan gratis bagi keluarga Pra KS & KS I
- Pendewasaan usia kawin, pendidikan kehidupan berkeluarga, keterampilan hidup dalam mempraktekan kehidupan sehat & berakhla sehat.
- Mengikuti pelatihan TOT dan pengelola BKB, BKL,BLR,BLK,dan kelompok UPPKS agar mampu memberikan pelatihan kepada pelaksana dilapangan

- Orientasi bagi kader di desa untuk menjaga kelangsungan kegiatan BKB, BKL,BLR,BLK,dan kelompok UPPKS agar memiliki wawasan dan pengetahuan.
- Memberikan penghargaan kepada kader BKB, BKL,BLR,BLK,dan kelompok UPPKS sebagai ujung tombak yang perlu dilakukan secara terus menerus.
- Pertemuan lintas sektor untuk membangun image BKB, BKL,BLR,BLK,dan kelompok UPPKS sebagai kebutuhan masyarakat sekarang dan yang akan datang melalui sosialisasi pada sektor lain
- Konsultasi pada bidang KS-PK Kabupaten ke propinsi.
- Pelatihan pengelolaan database BKB, BKL,BLR,BLK,dan kelompok UPPKS.
- kegiatan pameran dan gelanggang dagang dalam rangka Harganas dan temu kelola kelompok UPPKS untuk pemilihan peserta terbaik tingkat propinsi maupun tingkat nasional.
- Tindak lanjut kesepakatan kerja sama dengan mitra kerja dengan perum pegadaian, BRI,BPD melalui kredit usaha rumah tangga, KUR, KUK, dll.
- *Meningkatkan akses informasi dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi bagi keluarga dalam merencanakan kehamilan yang tidak diinginkan, khususnya bagi keluarga rentan, yaitu keluarga miskin, berpendidikan rendah, terpencil dan tidak terdaftar.*
- *Pembinaan pelayanan KIE dan pelayanan kesehatan reproduksi guna penanggulangan masalah kesehatan reproduksi.*
- *Meningkatkan pembinaan dan mengintegrasikan informasi dan pelayanan konseling bagi remaja tentang kehidupan seksual yang sehat HIV/AIDS, NAPZA dan perencanaan perkawinan melalui pembinaan kelompok remaja dan intitusi masyarakat lainnya.*
- *Meningkatkan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan penumbuhkembangan anak, pembinaan kesehatan ibu, bayi, anak dan remaja, serta pembinaan lingkungan keluarga secara terpadu melalui kelompok kegiatan bina keluarga dan pendidikan anak usia dini.*
- *Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga dan perempuan dalam kegiatan usaha ekonomi produktif, termasuk pengetahuan dan keterampilan usaha, serta fasilitas dalam mengakses sumber modalnya.*
- *Memaksimalkan upaya-upaya advokasi, promosi dan KIE Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga untuk peneguhan dan kelangsungan program serta pembinaan kemadirian intitusi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan KB.*
- *Meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen pembangunan Keluarga Berencana, termasuk pengelolaan SDM, data dan informasi, pengkajian, penelitian dan pengembangan serta bimbingan dan pengawasan program.*
- *Penguatan kelembagaan Pengarus Utamaan Gender (PUG).*
- *Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak.*
- *Penyebarluasan informasi gender dan anak.*
- *Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.*

BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka mengoprasionalkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan serangkaian program tetah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Program - program yang akan dilakukan tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut :

BELANJA TIDAK LANGSUNG	
	Belanja Tidak Langsung
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
	Penyediaan jasa administrasi keuangan
	Penyediaan alat tulis kantor
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
	Penyediaan Jasa Non PNS *)
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Program Keluarga Berencana	
	Pembinaan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Kegiatan Operasional Pelaksanaan PPSP Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	
	Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	
	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa
	Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan
	Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan
Program pelayanan kontrasepsi	
	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	
	Pelaksanaan Sosialisasi Kesetaraan Gender, pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	
	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	
	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	
	Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sebagai tolok ukur keberhasilan program dan kegiatan pada Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka ditetapkan indikator-indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan sasaran RPJMD sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur

BAB VII PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Kabupaten Tanah Bumbu 2011-2015, maka Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu telah mempunyai acuan dalam arah pembangunan lima tahun kedepan dalam menyikapi perkembangan dan dinamika yang terus berubah dengan cepat.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategis Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja. Oleh karena itu efisiensi dan efektifitas implementasi Renstra sangat memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten, stakeholders dan dukungan seluruh komponen organisasi.

Jadi visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu akan mudah dicapai dengan dukungan penuh dan upaya maksimal dari seluruh aparatur dengan memperhatikan faktor-faktor :

- Kepedulian yang tinggi dari semua jajaran aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dapat memberikan konstribusi terhadap keberhasilan organisasi secara menyeluruh.
- Peka terhadap perubahan dan perkembangan global yang mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi.
- Tim-tim kerja yang ada dilingkungan Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diharapkan dapat memadukan segala keahlian dan kelebihan personal yang dimiliki secara bersama-sama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan.